



BCPR RESEARCH:
Business Communication and Public Relations Journal

E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

<https://journal.e-greenation.org/BCPR> greenation.info@gmail.com +62 812-1046-7572

DOI: <https://doi.org/10.38035/bcpr>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tubuh Perempuan dalam Eksklusi dari Hak Milik Tanah dalam Program PHBM Perum Perhutani Kabupaten Bandung-Jawab: Fenomenologi Ketubuhan dan Perlawanan

Aulia Asmarani¹, Dadan Saputra², Thalita Syifa Fatimah³

¹Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia, aulia@iwu.ac.id

²Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia, ds_sanusi@yahoo.com

³Universitas Pendidikan Indonesia, ithafatimah97@upi.edu

Corresponding Author: aulia@iwu.ac.id¹

Abstract: *This study examines the bodily experiences of female farmers in the context of agrarian conflict in Bandung Regency, West Java, using a critical phenomenological approach. Land in Indonesian agrarian society is not only an economic asset, but also an existential space that contains collective memory, spirituality, and identity. However, the modern patriarchal agrarian legal system tends to reduce land to a formal object of ownership attached to men as heads of families. Field data shows that although women are fully involved in land management, they are rarely recorded in legal documents, are absent from village forums, and face intimidation from officials. The results of the study reveal three layers of exclusion experienced by women's bodies, namely legal-administrative exclusion, socio-cultural exclusion, and repressive exclusion. This exclusion causes material and symbolic wounds that manifest themselves in heavy work, physical illness, and the absence of formal recognition. However, women's bodies also appear as an arena of resistance through physical action against the authorities, collective aspirations to form women farmers' groups, and a critical awareness that exclusion is a social construct that must be opposed. By integrating the phenomenology of the body, ecofeminism, critical agrarian studies, gender-constitutive social relations theory, and the concept of symbolic power, this study shows that women's bodies are living archives of injustice as well as sources of social transformation. This study affirms that the recognition of women as legitimate agrarian subjects is not only administrative in nature, but also an epistemological, political, and ethical prerequisite for the creation of gender-equitable, equitable, and sustainable agrarian reform.*

Keyword: *agrarian studies; gender and land rights; ecofeminism; critical phenomenology; symbolic power; Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengalaman tubuh perempuan petani dalam konteks konflik agraria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kritis. Tanah dalam masyarakat agraris Indonesia bukan hanya aset ekonomi, melainkan ruang eksistensial yang memuat memori kolektif, spiritualitas, dan identitas. Namun, sistem hukum agraria modern yang bercorak patriarkal cenderung mereduksi tanah menjadi objek kepemilikan formal yang dilekatkan pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun perempuan terlibat penuh dalam pengelolaan lahan, mereka

jarang tercatat dalam dokumen legal, absen dalam forum desa, serta menghadapi intimidasi aparat. Hasil penelitian mengungkap tiga lapisan eksklusi yang dialami tubuh perempuan, yaitu eksklusi legal-administratif, eksklusi sosial-budaya, dan eksklusi represif. Eksklusi ini menimbulkan luka material dan simbolik yang terejawantah dalam kerja berat, sakit fisik, dan absennya rekognisi formal. Namun, tubuh perempuan juga tampil sebagai arena resistensi melalui aksi fisik menghadapi aparat, aspirasi kolektif membentuk kelompok perempuan tani, serta kesadaran kritis bahwa eksklusi adalah konstruksi sosial yang harus ditentang. Dengan mengintegrasikan fenomenologi ketubuhan, ekofeminisme, kajian agraria kritis, teori relasi sosial konstitutif gender, dan konsep kuasa simbolik, penelitian ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan adalah arsip hidup ketidakadilan sekaligus sumber lahirnya transformasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan perempuan sebagai subjek agraria sah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan syarat epistemologis, politis, dan etis bagi terciptanya reforma agraria yang adil gender, setara, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: studi agraria; gender dan hak atas tanah; ekofeminisme; fenomenologi kritis; kekuasaan simbolik; Indonesia

PENDAHULUAN

Tanah dalam masyarakat agraris Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang eksistensial yang memuat memori kolektif, spiritualitas, serta simbol identitas. Bagi perempuan petani, tanah bukan sekadar sumber produksi pangan, melainkan ruang kehidupan yang menyatu dengan tubuh melalui aktivitas harian, praktik budaya, dan keberlanjutan generasi. Relasi ini membentuk keterikatan ekologis sekaligus spiritual yang sulit dipisahkan antara tubuh perempuan, tanah, dan komunitas. Namun, dalam sistem hukum agraria modern yang bercorak patriarkal dan legal-formal, tanah kerap direduksi menjadi objek kepemilikan yang dilekatkan pada figur laki-laki sebagai kepala keluarga.

Struktur hukum negara, adat, dan praktik birokrasi saling memperkuat pola ini. Legalitas tanah hampir selalu didaftarkan atas nama laki-laki, sehingga kerja perempuan di lahan tidak mendapatkan pengakuan formal. Akibatnya, perempuan hadir sebatas tenaga kerja dan pengelola subsistensi, tanpa memperoleh status hukum maupun hak kepemilikan. Dalam konteks konflik agraria di Kabupaten Bandung, ketegangan ini terlihat jelas. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dimaksudkan untuk memperluas akses terhadap tanah, dalam praktiknya justru mereproduksi bias gender. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun perempuan berperan aktif dalam kerja agraria, jumlah mereka yang tercatat sebagai penerima legalitas tanah sangat terbatas (JDIH Kementerian LHK, 2018; Mimar Agribisnis, 2021).

Sebagai contoh, di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tani Mukti Giri Jaya, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, yang mengelola 596 hektar lahan Perhutani dengan 343 anggota, mayoritas penerima akses legal adalah laki-laki, yaitu 85 persen, sedangkan perempuan hanya 15 persen. Sementara itu, di LMDH Sasaka Patengan, Kecamatan Rancabali, yang mengelola 843,52 hektar lahan dengan 307 anggota, hanya 8 persen perempuan yang tercatat sebagai penerima legalitas, dibandingkan dengan 92 persen laki-laki (JDIH Kementerian LHK, 2018). Data ini memperlihatkan bahwa proporsi perempuan penerima hak formal masih sangat rendah dalam skema kemitraan kehutanan Perhutani di Jawa Barat.

Secara nasional, kesenjangan serupa juga terjadi. OECD (2023) melaporkan bahwa hanya 41 persen perempuan tercatat sebagai pemilik tanah, dibandingkan dengan 58 persen laki-laki. Laporan terbaru Farmonaut (2025) menunjukkan bahwa hanya 24 persen perempuan di sektor pertanian memiliki hak kepemilikan lahan yang sah dan aman, membatasi pengaruh ekonomi dan politik mereka. Rights and Resources Initiative (2023) juga mencatat bahwa 74

persen lahan di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen kelompok masyarakat terkaya, sehingga ruang kepemilikan perempuan semakin terpinggirkan.

Pendekatan fenomenologi ketubuhan menawarkan kerangka analisis kritis untuk membaca persoalan ini. Dengan menempatkan tubuh sebagai locus pengalaman, penelitian tidak hanya menyoroti eksklusi perempuan pada level administratif, tetapi juga mengungkap bagaimana tubuh mereka mengalami kelelahan, luka, represi, sekaligus menjadi ruang resistensi. Tubuh dipahami sebagai entitas hidup yang memuat pengalaman material seperti kerja, sakit, dan kekerasan serta dimensi simbolik yang meliputi ritual, identitas, dan spiritualitas. Dengan demikian, membaca agraria dari perspektif tubuh berarti mengurai relasi kuasa yang terwujud dalam keseharian perempuan petani.

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa realitas sosial agraria bersifat konstruksi sosial-politik yang patriarkal. Eksklusi perempuan dari kepemilikan tanah tidak hanya hadir dalam absennya nama mereka pada dokumen formal, tetapi juga termanifestasi dalam kerja fisik yang tak diakui, luka yang dialami tubuh, serta ketiadaan representasi mereka dalam forum hukum. Tanah dalam hal ini bukan hanya aset material, tetapi arena relasi kuasa yang menentukan siapa yang diakui sebagai subjek agraria.

Selain itu, penelitian ini berakar pada fenomenologi kritis yang menekankan pentingnya pengalaman langsung tubuh perempuan sebagai dasar pengetahuan. Informasi tentang eksklusi agraria tidak hanya ditemukan dalam regulasi atau data statistik, melainkan melalui narasi tubuh bagaimana perempuan merasakan kelelahan, ketakutan, resistensi, dan harapan. Dengan demikian, pengetahuan dibangun melalui dialektika antara pengalaman konkret perempuan petani, refleksi kritis peneliti, serta teori kritis agraria dan gender.

Penelitian ini menekankan dimensi etis dan transformatif. Tujuannya tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga membongkar struktur kuasa patriarkal yang mereproduksi eksklusi perempuan. Dengan menempatkan tubuh perempuan sebagai locus eksklusi sekaligus resistensi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap advokasi kebijakan agraria yang lebih setara gender, serta memperkuat posisi perempuan petani sebagai subjek sah dalam ruang agraria. Penelitian ini juga membawa komitmen keberpihakan pada kelompok marginal, khususnya perempuan petani yang selama ini terpinggirkan dari hak kepemilikan tanah.

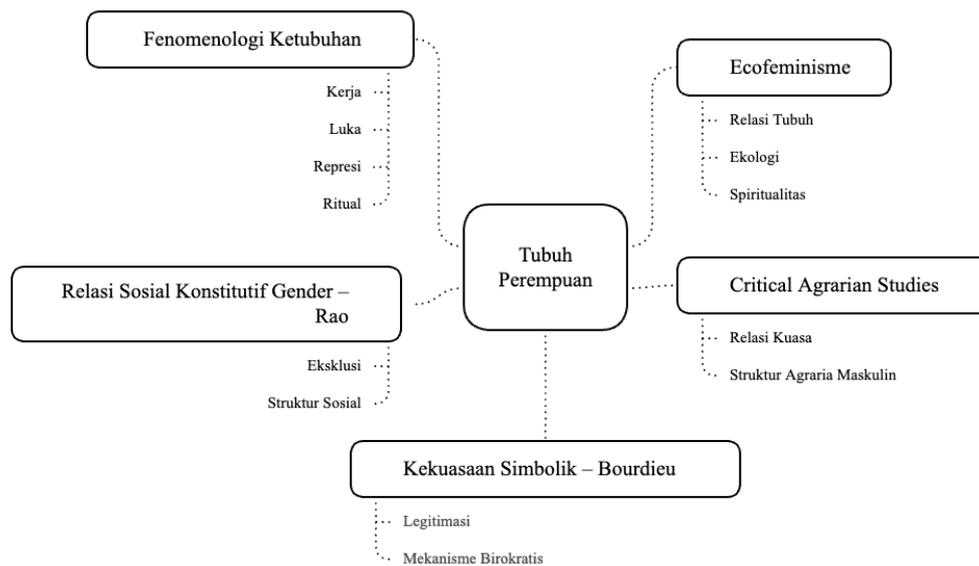
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan beberapa perspektif teoritis yang saling melengkapi. Pertama, fenomenologi ketubuhan dipakai untuk menyingkap pengalaman langsung tubuh perempuan dalam konflik agraria, mencakup dimensi kerja, luka, represi, dan ritual yang mereka alami. Kedua, kajian agraria kritis memberikan kerangka untuk menempatkan pengalaman tersebut dalam konteks relasi kuasa dan struktur agraria yang bercorak maskulin. Ketiga, pendekatan ekofeminisme menghubungkan luka yang dialami tubuh perempuan dengan kerusakan ekologis, sekaligus menegaskan relasi spiritual dan ekologis antara perempuan dan tanah.

Selanjutnya, teori relasi sosial konstitutif gender yang dikemukakan Rao (2017) digunakan untuk menjelaskan bahwa eksklusi perempuan dari hak agraria bukanlah peristiwa individual, melainkan hasil dari struktur sosial yang terlembaga. Di sisi lain, konsep kekuasaan simbolik Bourdieu (1991) membantu membaca bagaimana praktik eksklusi tersebut dilegitimasi melalui mekanisme sosial dan birokratis yang dianggap wajar.

Dengan memadukan perspektif ini, penelitian menempatkan tubuh perempuan sebagai arena di mana eksklusi dan resistensi berlangsung secara bersamaan. Tubuh perempuan dipandang bukan hanya sebagai ruang yang merekam jejak kekerasan agraria, tetapi juga sebagai titik awal yang melahirkan perlawanan dan strategi transformasi.

Struktur Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kritis dengan desain kualitatif. Fenomenologi dipilih karena berfokus pada penggalian esensi pengalaman tubuh perempuan dalam konflik agraria, sedangkan sifat kritis menekankan analisis relasi kuasa yang menubuh dalam struktur sosial dan kebijakan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memotret pengalaman subjektif, tetapi juga menghubungkannya dengan dimensi politik, struktural, dan simbolik yang mereproduksi eksklusi (Creswell, 2013). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menjadi salah satu wilayah implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Daerah ini dipilih karena memperlihatkan kasus nyata ketimpangan gender, di mana perempuan petani berperan aktif sebagai penggarap tetapi jarang tercatat sebagai pemilik atau penerima legalitas formal.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, terdiri atas lima perempuan petani yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu aktif dalam pengelolaan lahan, terlibat dalam konflik agraria atau program PHBM, mengalami bentuk eksklusi seperti tidak tercatat dalam legalitas formal atau mengalami represi aparat, serta memiliki variasi usia, status perkawinan, peran domestik, dan keterlibatan sosial. Jumlah ini merujuk pada pandangan Creswell (2013) bahwa penelitian fenomenologis idealnya melibatkan antara tiga hingga sepuluh partisipan untuk menggali esensi pengalaman tanpa kehilangan kedalaman data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, observasi partisipatif terhadap aktivitas informan di lahan pertanian, serta dokumentasi kebijakan, arsip desa, dan catatan distribusi tanah. Wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskrip verbatim, sementara observasi mencatat ekspresi tubuh, interaksi sosial, dan relasi gender dalam ruang agraria. Dokumentasi melengkapi data primer dengan memberikan konteks kebijakan dan bukti administratif.

Analisis data menggunakan pendekatan tematik-fenomenologis melalui tiga tahap: deskripsi pengalaman tubuh, identifikasi pola eksklusi dan resistensi, serta refleksi kritis dengan teori. Proses analisis dilakukan dengan open coding, axial coding, dan selective coding, kemudian dikaitkan dengan kerangka teoretis fenomenologi ketubuhan, ecofeminisme, kajian agraria kritis, relasi sosial konstitutif gender, dan kekuasaan simbolik.

Untuk menjaga validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil transkripsi dan interpretasi kepada informan. Peneliti juga menjaga reflektivitas melalui catatan lapangan dan diskusi sejawat (peer debriefing) guna memperoleh kritik konstruktif. Narasi disajikan dengan thick description agar pembaca dapat memahami konteks sekaligus menilai transferabilitas temuan ke kasus serupa (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tubuh sebagai Lokus Eksklusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan petani terlibat penuh dalam pengelolaan lahan mulai dari menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian seperti kopi dan pisang namun kontribusi tersebut tidak tercermin dalam pengakuan formal. Nama yang tercatat dalam dokumen legalitas tanah hampir selalu laki-laki, baik suami maupun kepala keluarga, sehingga perempuan hanya menerima sebagian dari hasil panen tanpa hak legal yang sah. Informan juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam rapat desa atau kelompok tani karena dianggap sebagai urusan laki-laki. Beberapa bahkan mengalami intimidasi aparat kehutanan ketika dituduh menggarap lahan tanpa izin. Pola eksklusi ini muncul dalam tiga bentuk: eksklusi legal-administratif, eksklusi sosial-budaya, dan eksklusi represif. Fenomenologi ketubuhan (Merleau-Ponty, 1962) membantu melihat absennya tubuh perempuan dalam dokumen formal sebagai bentuk penghapusan eksistensial. Butler (1990) menekankan bahwa performativitas tubuh perempuan ditekan, sementara Critical Agrarian Studies (Akram-Lodhi & Kay, 2010) menafsirkan hal ini sebagai produk struktur kuasa maskulin yang dilegitimasi melalui kuasa simbolik (Bourdieu, 1990).

Tubuh, Luka, dan Kerja

Informan menggambarkan luka fisik akibat kerja agraria seperti tangan kapalan, sakit punggung, dan kelelahan yang sering dianggap wajar, bagian dari “tugas alami perempuan.” Meski tubuh mereka menanggung beban ganda, baik di lahan maupun di rumah, kerja ini tidak pernah diakui secara formal. Tiga tema utama muncul: tubuh sebagai beban kerja ganda, tubuh sebagai arsip eksklusi yang merekam luka, dan normalisasi penderitaan yang dilembagakan secara sosial. Dalam kerangka fenomenologi, luka dipahami sebagai ekspresi eksistensial ketidakadilan (Merleau-Ponty, 1962). Perspektif ekofeminisme menekankan bahwa luka tubuh perempuan paralel dengan eksploitasi ekologis (Mies & Shiva, 1993), sedangkan kajian agraria kritis melihatnya sebagai reproduksi tenaga kerja yang tidak pernah diakui (Bernstein, 2010). Dengan demikian, luka tubuh menjadi arsip material dari struktur agraria yang bias gender.

Tubuh sebagai Resistensi

Meskipun mengalami eksklusi dan luka, tubuh perempuan juga tampil sebagai ruang resistensi. Informan mengisahkan pengalaman menghadapi aparat kehutanan demi mempertahankan lahan, menyuarakan aspirasi pembentukan kelompok perempuan tani, serta mengusulkan pelatihan hukum agraria untuk memperkuat pemahaman hak mereka. Bentuk resistensi ini dapat dipetakan ke dalam tiga pola: resistensi fisik-emosional, resistensi simbolik, dan resistensi berbasis kesadaran kritis. Dalam perspektif ekofeminisme, perlawanan perempuan dipahami sebagai pembelaan ekologis dan spiritual (Shiva, 1988). Konsep conscientização Freire (1970) menegaskan bahwa kesadaran kritis muncul ketika subjek memahami bahwa eksklusi bukanlah hal alamiah, melainkan konstruksi sosial. Butler (1990) menambahkan bahwa tindakan tubuh mampu mendestabilisasi norma dominan. Temuan ini memperlihatkan bahwa tubuh perempuan tidak hanya berposisi sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor transformatif yang menyimpan daya perlawanan.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, tubuh perempuan petani di Kabupaten Bandung menjadi arena kontradiktif: locus eksklusif sekaligus locus resistensi. Tubuh mengalami kerja tanpa rekognisi, luka tanpa legitimasi, dan absensi dari forum legal; namun tubuh yang sama juga menjadi sumber artikulasi politik dan benih transformasi sosial. Dengan mengintegrasikan fenomenologi ketubuhan, ekofeminisme, kajian agraria kritis, relasi sosial konstitutif gender (Rao, 2017), dan konsep kuasa simbolik (Bourdieu, 1990), hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengalaman tubuh perempuan adalah arsip hidup dari struktur agraria patriarkal sekaligus titik awal perlawanan kolektif.

Pembahasan

Tubuh sebagai Arena Subordinasi

Fenomenologi ketubuhan menempatkan tubuh sebagai medium utama manusia berhubungan dengan dunia (Merleau-Ponty, 1962). Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa tubuh perempuan petani di Kabupaten Bandung ditempatkan dalam posisi subordinasi. Meskipun mereka hadir penuh di lahan dari menanam, merawat, hingga memanen kopi, pisang, atau hortikultura nama perempuan jarang tercatat dalam dokumen legalitas agraria. Data dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menunjukkan bahwa proporsi penerima hak legal formal didominasi laki-laki: di LMDH Tani Mukti Giri Jaya, 85% penerima adalah laki-laki, sementara perempuan hanya 15%; sedangkan di LMDH Sasaka Patengan, laki-laki mencapai 92% dan perempuan hanya 8% (JDIH KLHK, 2018; Mimbar Agribisnis, 2021). Praktik administratif ini tampak teknis, tetapi sesungguhnya mencerminkan kekerasan simbolik (Bourdieu, 1990), karena dominasi maskulin dilembagakan dan dinormalisasi. Tubuh perempuan yang bekerja setiap hari di lahan dianggap tidak layak dicatat, sehingga absensi legal mereka bukan sekadar kehilangan dokumen, melainkan penghapusan eksistensial dari ruang agraria.

Tubuh dan Relasi Ekologis

Ekofeminisme melihat keterhubungan erat antara tubuh perempuan dan ekologi. Luka fisik seperti tangan kapalan, sakit punggung, atau kelelahan kronis mencerminkan luka ekologis pada tanah yang dikapitalisasi dan birokratisasi (Mies & Shiva, 1993; Shiva, 1988). Informan menceritakan bagaimana ritual adat—seperti *hajat leweung* atau *tatali karuhun* menjadi cara merawat relasi spiritual dengan tanah. Dalam ritual ini, tubuh perempuan hadir sebagai mediator ekologis dan spiritual yang menjaga kesinambungan komunitas. Namun, ketika negara menghapus nama mereka dari dokumen legal, relasi ekologis dan spiritual tersebut ikut dilemahkan. Penelitian serupa di Jawa Tengah juga menemukan bahwa penghapusan perempuan dari akses legal agraria berdampak pada menurunnya partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan (Siscawati et al., 2018). Dengan demikian, luka tubuh perempuan dapat dibaca sebagai tanda rusaknya relasi ekologis akibat sistem agraria patriarkal.

Tubuh sebagai Ruang Resistensi

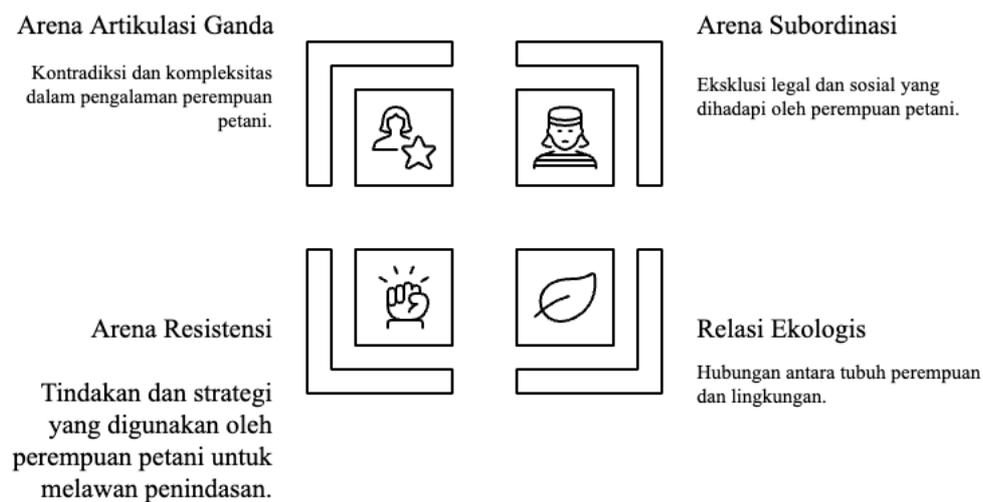
Meski berada dalam subordinasi, tubuh perempuan juga tampil sebagai ruang resistensi. Salah satu informan menyampaikan bahwa ia lebih memilih “diseret aparat daripada anak-anaknya kelaparan,” ketika mempertahankan akses atas lahan. Perlawanan fisik ini merupakan bentuk performativitas subversif (Butler, 1990), di mana tubuh yang dianggap pasif justru mendestabilisasi norma dominan. Selain itu, resistensi juga muncul secara simbolik, misalnya melalui aspirasi pembentukan Kelompok Wanita Tani sebagai wadah perempuan mengakses informasi dan memperjuangkan hak agraria. Aspirasi ini sejalan dengan temuan di India bahwa organisasi perempuan desa memperkuat posisi tawar mereka dalam program perhutanan sosial (Agarwal, 2010). Informan juga mengungkapkan kebutuhan pelatihan hukum agraria agar perempuan tidak hanya menggarap lahan, tetapi juga memahami kerangka legal yang

melingkupinya. Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran kritis (*conscientização*) sebagaimana dijelaskan Freire (1970), bahwa eksklusi bukan kondisi alamiah, melainkan konstruksi sosial yang harus dilawan.

Tubuh sebagai Arena Artikulasi Ganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan petani adalah arena kontradiktif, yakni locus subordinasi sekaligus locus resistensi. Sebagai arena subordinasi, tubuh perempuan disingkirkan melalui mekanisme legal, sosial, dan simbolik yang menempatkan mereka sebagai obyek kerja tanpa pengakuan formal. Namun, sebagai arena resistensi, tubuh yang sama melahirkan daya perlawanan dalam bentuk aksi fisik menghadapi aparat, resistensi simbolik melalui ritual adat, serta politik kolektif melalui aspirasi organisasi perempuan. Dalam kerangka Critical Agrarian Studies, agraria dipahami sebagai arena konflik kuasa yang penuh kontradiksi (Akram-Lodhi & Kay, 2010; Bernstein, 2010). Dalam konteks penelitian ini, kontradiksi itu tampak jelas pada tubuh perempuan yang menyimpan luka akibat ketidakadilan, sekaligus menjadi sumber artikulasi politik dan transformasi sosial.

Struktur Pengalaman Perempuan Petani



Gambar 2. Struktur Pengalaman Perempuan Petani

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan petani di Kabupaten Bandung mengalami eksklusi berlapis: legal-administratif, sosial-budaya, dan represif. Secara legal, nama perempuan hampir tidak pernah tercatat dalam sertifikat tanah maupun dokumen perhutanan sosial; legalitas agraria selalu dilekatkan pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Secara sosial, perempuan diposisikan sebagai pelengkap domestik sehingga absen dalam forum desa dan kelompok tani. Pada dimensi represif, tubuh perempuan berhadapan langsung dengan aparat kehutanan, menghadapi intimidasi, hingga ancaman kriminalisasi. Eksklusi ini bukan sekadar absensi administratif, melainkan penghapusan eksistensial tubuh perempuan dari ruang agraria. Tubuh perempuan merekam subordinasi melalui kerja berat, luka fisik, dan kekerasan simbolik yang dinormalisasi. Luka seperti kapalan, sakit punggung, dan kelelahan dianggap wajar, padahal menandakan kerja tanpa pengakuan. Luka tubuh ini paralel dengan absennya rekognisi hukum maupun sosial, memperlihatkan bagaimana habitus patriarkal menempatkan kerja perempuan sebagai "bantuan," bukan kontribusi sah agraria. Dalam perspektif ekofeminisme, luka tubuh perempuan sejalan dengan luka ekologis pada tanah: keduanya sama-sama dieksploitasi tanpa pengakuan.

Namun, tubuh perempuan juga berfungsi sebagai arena resistensi. Resistensi fisik-emosional tampak ketika perempuan menghadapi aparat untuk mempertahankan lahan demi pangan keluarga. Resistensi simbolik muncul melalui aspirasi membentuk kelompok perempuan tani dan dorongan memperoleh pelatihan hukum agraria. Resistensi politis hadir dalam kesadaran kritis bahwa eksklusi adalah konstruksi sosial, bukan kodrat, sehingga harus ditantang. Tubuh yang sebelumnya dimarginalkan bertransformasi menjadi medium artikulasi politik yang mengguncang norma agraria patriarkal.

Dengan fenomenologi ketubuhan, ekofeminisme, kajian agraria kritis, teori relasi sosial konstitutif gender, dan konsep kuasa simbolik, penelitian ini menegaskan bahwa tubuh perempuan merupakan arsip hidup ketidakadilan sekaligus benih transformasi sosial. Tubuh merekam subordinasi melalui kerja, luka, dan absensi legal; sekaligus menjadi ruang lahirnya perlawanan melalui tindakan, ritual, dan organisasi kolektif.

REFERENSI

- Akram-Lodhi, A. H., & Kay, C. (2010). *Peasants and globalization: Political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge.
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Sterling, VA: Kumarian Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *SK Pengakuan & Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK) No. 9243/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018*. Jakarta: KLHK.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Merleau-Ponty, M. (1962). *Phenomenology of perception*. London: Routledge.
- Mies, M., & Shiva, V. (1993). *Ecofeminism*. London: Zed Books.
- Mimbar Agribisnis. (2021). Dinamika Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Agribisnis dan Pertanian Universitas Galuh*.
- OECD. (2023). *Social institutions and gender index (SIGI) country profile: Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- Peluso, N. L., & Ribot, J. C. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rao, S. (2021). Gender as constitutive social relation: Re-thinking critical agrarian studies. *Journal of Peasant Studies*, 48(5), 835–856. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1847094>
- Rights and Resources Initiative. (2023). *Land rights for women under Indonesia's agrarian reform: Land as a symbol of farmers' dignity and survival*. Washington, DC: RRI.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (1996). *Feminist political ecology: Global issues and local experiences*. London: Routledge.
- Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, ecology and development*. London: Zed Books.
- Siscawati, M. (2018). Gender perspective in Indonesia's social forestry program: Opportunities and challenges. *Forest and Society*, 2(2), 164–180. <https://doi.org/10.24259/fs.v2i2.4738>